



PERANAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM PEMBANGUNAN REGIONAL DARI SEGI EKONOMI MAKRO (Studi Kasus Sumatera Utara)

Teguh Wahyono

Paper yang berjudul “Peranan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Pembangunan Regional dari segi Ekonomi Makro” ini merupakan hasil penelitian data sekunder yang dilaksanakan di provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah: a) mengetahui sumbangan hasil perkebunan kelapa sawit terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), b) mengetahui peranan kelapa sawit pada penyerapan tenaga kerja, penerimaan sektor fiskal dan pengembangan wilayah. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Ditinjau dari segi kontribusi subsektor, maka perkebunan merupakan penyumbang terbesar dalam sektor pertanian. Pada tahun 2002, subsektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp10,04 triliun (39,78%). Walaupun terjadi penurunan dalam persentase dibanding tahun 2001 yang sebesar 40,16%, tetapi kontribusi subsektor ini terhadap sektor pertanian masih paling tinggi dibandingkan subsektor lainnya. Tingginya kontribusi subsektor perkebunan ini oleh karena perkebunan di Sumatera Utara memang sudah mulai diusahakan secara komersial sejak zaman kolonial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai produksi kelapa sawit di Sumatera Utara pada tahun 2003 menurut harga berlaku adalah Rp10,15 triliun, dengan kontribusi terhadap perkebunan, pertanian dan PDB seluruh sektor berturut-turut adalah 87%, 37% dan 11%. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp3,8 milyar, Pajak Penghasilan (PPh) Rp1,57 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp890,4 milyar dan Pajak Ekspor (PE) Rp154,9 milyar. Sampai akhir 2003 areal kelapa sawit 760.387 ha, keperluan tenaga kerja untuk kegiatan kerja di kebun adalah 4 orang setiap 10 ha, maka jumlah yang dapat diserap adalah 1.836.510 orang. Jumlah pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) mencapai 85 unit dengan kapasitas olah total 3.400 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Dalam setiap PKS yang berkapasitas olah 30 ton TBS per jam diperlukan tenaga kerja sebanyak 136 orang, maka untuk seluruh PKS diperlukan 15.400 orang. Tenaga kerja dalam jumlah banyak lagi akan dapat diserap oleh industri hilir yang berbahan baku kelapa sawit. Pembangunan perkebunan juga meliputi pembangunan prasarana dan sarana fisik, seperti: jalan, jembatan, gedung sekolah, tempat ibadah dan sarana lainnya. Untuk selanjutnya diikuti dengan pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial, misalnya pusat perdagangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, pusat kesehatan, olah raga, hiburan dan lain-lain

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan ekonomi suatu bangsa di suatu negara atau warga masyarakat di daerah. Indikator lainnya adalah pemerataan, kemiskinan,

pendapatan per kapita, dan kesempatan kerja. Sampai dengan akhir 2002, berdasar harga konstan tahun 1993, laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara 4,04%, yaitu dari Rp 24,91 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp 25,92 triliun pada 2002 (Tabel 1).

Laju pertumbuhan tersebut lebih

Tabel 1. Perkembangan beberapa indikator ekonomi Sumatera Utara 1999-2002

No.	Indikator	Satuan	1999	2000	2001	2002
1.	Pertumbuhan ekonomi	Persen	2,59	4,83	3,72	4,04
2.	PDRB harga berlaku	Triliun Rp.	61,96	67,66	77,80	86,74
3.	PDRB harga konstan 1993	Triliun Rp.	22,91	24,02	24,91	25,92
4.	PDRB per kapita harga berlaku	Juta Rp.	5,48	5,88	6,68	7,36
5.	PDRB per kapita harga konstan 93	Juta Rp.	2,02	2,09	2,14	2,20
6.	Neraca perdagangan luar negeri	Milyar USS	1,91	1,66	1,43	2,07
	- Ekspor	Milyar USS	2,61	2,44	2,29	2,89
	- Impor	Milyar USS	0,70	0,78	0,86	0,82

masih lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2000 (4,83%); apalagi jika dibandingkan dengan tahun 1997 (5,70 %) akan jauh lebih rendah.

Sementara itu, berdasarkan harga berlaku, PDRB Sumatera Utara meningkat dari Rp 77,80 triliun pada 2001 menjadi Rp 86,74 triliun pada tahun 2002. Meningkatnya PDRB ini tentu akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan penduduk yang dapat dilihat secara tidak langsung dari besarnya PDRB per kapita. Sampai dengan akhir 2002, PDRB per kapita pada harga konstan 1993 tercatat Rp 2,20 juta, selalu lebih tinggi dibanding tahun 1999 sampai dengan 2001. Sedangkan PDRB per kapita pada harga berlaku tahun 2002 tercatat sebesar Rp 7,36 juta lebih tinggi dibandingkan tahun 2001 yang sebesar Rp 6,68 juta, juga dibanding masa-masa sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2002 yang sebesar 4,04%, ternyata lebih tinggi daripada angka nasional yang sebesar 3,66%. Kondisi ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi bahwa pemerintah daerah Sumatera Utara

telah lebih baik secara rata-rata dari seluruh propinsi di Indonesia dalam hal peningkatan kehidupan ekonomi.

Peranan Sektor Pertanian pada Per-ekonomian Sumatera Utara

Peranan sektor pertanian dalam per-ekonomian Sumatera Utara sangat penting, terutama dalam hal kemandirian pemenuhan kebutuhan primer dan penyerapan tenaga kerja. Penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian mencapai 55,56%; di kawasan pedesaan angka ini lebih tinggi lagi yaitu mencapai 79,49%. Selain itu, pertanian juga merupakan sektor utama penyumbang nilai tambah terbesar di propinsi Sumatera Utara (11).

Sejak 1999, sektor pertanian kembali menjadi *leading sector* di Sumatera Utara, kontribusi yang cukup besar ini terutama didorong oleh sub sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan yang merupakan sumber kehidupan ekonomi yang bersifat tradisional di Sumatera Utara. Pada tahun 2002, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Utara sebesar 29,33%,

Tabel 2. Pertumbuhan ekonomi menurut harga konstan 1993 dan kontribusi seluruh sektor di Sumatera Utara tahun 2001-2003

No.	Sektor	Kontribusi (%)			Pertumbuhan (%)		
		2001	2002	2003	2001	2002	2003
1.	Pertanian	31.72	30.23	29.33	3.31	0,05	0,18
2.	Pertambangan & penggalian	1.38	1.65	1.76	6.47	7,46	2,35
3.	Industri pengolahan	21.49	26.33	25.88	4.39	7,26	7,17
4.	Listrik, gas & air bersih	1.58	1.22	1.49	7.28	8,60	6,86
5.	Bangunan	4.27	4.19	4.34	4.01	4,24	5,65
6.	Perdagangan, hotel & restoran	17.18	19.01	18.49	3.67	4,98	7,07
7.	Pengangkutan & komunikasi	8.41	5.61	29.33	6.80	6,16	6,53
8.	Keuangan, sewa & jasa perusahaan	6.89	4.29	4.55	1.91	6,08	4,12
9.	Jasa-jasa	7.09	7.47	8.08	1.77	3,21	4,21
	Total (%)	100.00	100.00	100.00			
	Rata-rata (%)				4.83	4,04	4,44

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara (2003) dalam Zen (2004)

lebih rendah daripada tahun 2001 yang besarnya 30,23% (Tabel 2).

Ditinjau dari segi kontribusi sub-sektor, maka perkebunan merupakan penyumbang terbesar dalam sektor pertanian. Pada tahun 2002, subsektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp10,04 triliun (39,78%). Walaupun terjadi penurunan persentase dibanding tahun 2001 sebesar 40,16%, tetapi kontribusi sub sektor ini terhadap sektor pertanian masih paling tinggi dibandingkan sub sektor lainnya. (Tabel 3). Tingginya kontribusi sub sektor perkebunan ini karena perkebunan di Sumatera Utara memang sudah mulai diusahakan secara komersial sejak zaman kolonial.

Peranan Subsektor Perkebunan

Dalam upaya menggali potensi perkebunan, pemerintah Indonesia menetapkan

kan arah, dan program pembangunan perkebunan. Menurut arahan yang ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN) 1993, industri pertanian (termasuk perkebunan) dan industri lain yang terkait, terus didorong perkembangannya sehingga mampu memanfaatkan peluang pasar, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Semuanya diarahkan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat pada umumnya (1,3).

Sebagai tindak lanjut dari arah yang ditetapkan tersebut pemerintah melaksanakan program pembangunan perkebunan, selain ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi juga pemerataan pembangunan (2,3). Maka dari itu pola yang digunakan untuk melaksanakan program pembangunan perkebunan selain

Tabel 3. PPDRB sektor pertanian di Sumatera Utara menurut subsektor tahun 1998 - 2002 (milyar rupiah)

No.	Subsektor	1998	1999	2000	2001	2002
1.	Tanaman bahan makan	4.948,53 (38,36)*	6.898,70 (36,36)	7.227,44 (35,99)	8.213,99 (35,14)	8.932,76 (35,39)
2.	Perkebunan	4.947,08 (38,35)	7.883,81 (41,55)	7.904,96 (39,36)	9.389,28 (40,16)	10.042,58 (39,78)
3.	Peternakan	1.393,67 (10,80)	1.816,84 (9,58)	1.958,79 (9,75)	2.203,93 (9,43)	2.387,96 (9,46)
4.	Perikanan	1.044,56 (8,10)	1.584,19 (8,35)	2.062,86 (10,27)	2.453,38 (10,49)	2.732,40 (10,82)
5.	Kehutanan	566,66 (4,39)	789,23 (4,16)	930,17 (4,63)	1.116,83 (4,78)	1.148,23 (4,55)
	Pertanian	12.900,48 (100,00)	18.972,77 (100,00)	20.084,21 (100,00)	23.377,42 (100,00)	25.243,93 (100,00)

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara (2003) dalam Zen (2004)

Keterangan: *angka dalam kurung adalah presentase terhadap pertanian

Tabel 4. Produksi beberapa komoditi perkebunan rakyat di Sumatera Utara 1998-2002 (000 ton)

No.	Jenis Tanaman	1998	1999	2000	2001	2002
1.	Karet	192	261	233	233	235
2.	Kelapa Sawit *)	1.492	1.701	2.027	2.304	2.337
3.	Kopi	34	22	38	39	43
4.	Kelapa	109	106	113	111	115
5.	Coklat	13	16	17	19	20
6.	Kemenyan	5	5	5	5	8
7.	Kemiri	11	12	8	9	16
8.	Tebu	19	19	10	6	3
9.	Jahe	17	16	14	19	15

Sumber: Dinas Perkebunan Prop. SU dalam SUDA-2002, BPS Prop. SU

*)Keterangan: Kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar (TBS).

perkebunan besar negara (PBN) dan perkebunan besar swasta (PBS) juga yang berorientasi pada pengembangan perkebunan rakyat. Contoh pola pengembangan perkebunan rakyat misalnya proyek

pengembangan tanaman ekspor (PRPTE), perusahaan inti rakyat (PIR), pola Koperasi dan lain-lain (9).

Subsektor perkebunan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembira-

kan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. Secara umum produksi perkebunan besar lebih besar dibandingkan dengan perkebunan rakyat kecuali produksi kopi, kemenyan, kemiri dan jahe yang tidak dikelola oleh perkebunan besar. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan lebih dititik beratkan pada perkebunan besar tanpa mengabaikan perkebunan rakyat. Pada tahun 2002, hampir semua komoditi perkebunan rakyat di Sumatera Utara mengalami peningkatan, kecuali tanaman tebu dan jahe (Tabel 4).

Usaha perkebunan besar di Sumatera Utara dilaksanakan melalui dua macam badan usaha, yaitu perusahaan perkebunan besar yang dikelola negara (PTPN) dan perusahaan perkebunan besar yang dikelola oleh swasta (PBS). Komoditi perkebunan besar di Sumatera Utara yang utama adalah karet, kelapa sawit, teh, kakao, tebu dan tembakau, yang produksinya dari tahun 1998-2002 tercantum pada Tabel 5.

Tanaman kelapa sawit yang menjadi primadona perkebunan di Sumatera Utara mengalami peningkatan produksi, baik

yang diusahakan rakyat maupun oleh negara. Produksi kelapa sawit yang terdiri dari Tandan Buah Segar (TBS), *Crude Palm Oil* (CPO), dan inti sawit berturut-turut 3.570 ribu ton, 743 ribu ton dan 187 ribu ton pada tahun 1998. Produksi tersebut terus meningkat (kecuali inti sawit) hingga mencapai 3.678 ribu ton, 782 ribu ton dan 187 ribu ton pada tahun 2002.

2. PERANAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

Kontribusi terhadap PDRB

Kelapa sawit diusahakan secara komersial pada tahun 1911 yaitu di kebun Tanah Itam Ulu, Sumatera Utara, dan masa-masa selanjutnya terus berkembang. Faktor utama yang mendukung berkembangnya industri perkebunan pada masa itu antara lain adalah kondisi lahan yang sesuai dan tenaga kerja yang melimpah dengan harga murah.

Sejak nasionalisasi perkebunan bekas perusahaan Belanda pada sekitar tahun 1957 sampai sekarang, produksi kelapa

sawit di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena intensifikasi dan ekstensifikasi.

Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara pada tahun 2003 adalah 760.387 ha, dengan produksi CPO 2.494.253 ton dan inti sawit (PK) 623.563 ton. Jika produksi CPO dan PK dikonversi dalam nilai rupiah

Tabel 5. Produksi beberapa komoditi perkebunan besar milik negara di Sumatera Utara 1998-2002 (000 ton)

No.	Jenis Tanaman	1998	1999	2000	2001	2002
1.	Karet	37	37	37	39	40
2.	Kelapa Sawit (TBS)	3.570	3.659	3.718	3.650	3.678
3.	Minyak Sawit (CPO)	743	775	779	772	782
4.	Inti Sawit (PK)	187	186	188	185	185
5.	T e h	96	87	78	77	71
6.	Coklat	20	21	21	17	16
7.	Tebu	73	57	32	46	39
8.	Tembakau	1	2	1	1	1

Sumber : Kantor Inspeksi PTPN Wilayah dalam SUDA-2002, BPS Prop. SU (5)

dengan harga rata-rata CPO Rp3.000/kg (pasar lokal) dan Rp 4.140/kg (untuk pasar ekspor) dan harga rata-rata PK Rp 2.000/kg, maka nilai CPO tersebut adalah Rp8,9 triliun dan nilai PK adalah Rp1,25 triliun; sehingga nilai produksi seluruhnya Rp10,15 triliun (10).

Sementara itu nilai PDRB sektor pertanian secara keseluruhan menurut data dari BPS Sumatera Utara pada 2002 adalah Rp25,24 triliun dan PDRB subsektor perkebunan adalah Rp10,04 triliun. Jika PDRB sektor pertanian pada 2003 tumbuh menjadi Rp27,77 triliun (asumsi pertumbuhan 10%) dan PDRB subsektor perkebunan tumbuh menjadi Rp11,66 triliun, maka kontribusi kelapa sawit terhadap PDRB perkebunan dan pertanian masing-masing adalah 87% dan 37%. Jika kontribusi pertanian terhadap PDRB seluruh sektor adalah sekitar 30%, maka kontribusi kelapa sawit adalah 11%. Kontribusi ini tergolong tinggi, lagi pula usaha perkebunan ini merupakan sumber pendapatan non migas yang dapat diperbarui (*renewable*).

Kontribusi terhadap Pajak

Dipandang dari segi pendapatan pemerintah melalui pajak, maka dari usaha industri perkebunan kelapa sawit, paling tidak dapat digali 4 macam sumber pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Ekspor (PE).

Jika pada tahun 2003, luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara adalah 760.387 ha dan PBB per tahun adalah Rp5000/ha/tahun, maka kontribusinya terhadap PBB adalah Rp3,8 milyar/tahun.

Kontribusi usaha terhadap PPh dapat diperhitungkan melalui asumsi bahwa proporsi laba perusahaan adalah 65% dari penerimaan dan PPh 30% dari laba. Maka dari itu potensi PPh yang dapat disumbangkan kepada negara pada tahun 2003 adalah Rp1,98 triliun.

Selanjutnya kontribusi usaha terhadap PPN, dapat diperhitungkan bahwa penerimaan penjualan CPO dan PK adalah Rp10,15 triliun dan PPN proporsinya 10% dari laba. Maka dari itu potensi PPN yang dapat disumbangkan kepada negara pada tahun 2003 adalah Rp660 milyar.

Selama ini penerimaan devisa dari subsektor perkebunan sebagian besar diperoleh melalui ekspor, bahkan pada masa kolonial Belanda hasil ekspor komoditi perkebunan ini merupakan tulang punggung perekonomian negara. Estimasi volume ekspor CPO oleh seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara pada tahun 2003 adalah sebesar 1,25 juta ton, dan harga rata-rata US\$ 450/ton, maka nilai ekspor dari CPO ini akan mencapai nilai US\$561,2 juta. Jika ketetapan pajak ekspor yang diberlakukan adalah 3%, maka sumbangan pajak ekspor CPO pada tahun 2003 terhadap negara akan mencapai US\$16,8 juta atau sekitar Rp154,9 milyar.

Penyerapan Tenaga Kerja

Selain sistem perkebunan besar, pengembangan dengan pola perkebunan yang melibatkan rakyat juga ditempuh, terutama ditujukan untuk mencapai sasaran pemerataan pembangunan. Dalam konsepsi pola ini, didasarkan adanya perbedaan yang sangat besar antara perkebun-

an besar dan perkebunan rakyat dipandang dari segi teknologi, permodalan, produktivitas, kualitas produk, efisiensi usaha serta akses pasarnya, yaitu bahwa perkebunan besar merupakan pihak yang lebih unggul. Dengan kata lain, menurut teori dualisme ekonomi, perkebunan besar merupakan sektor modern sedangkan perkebunan rakyat merupakan sektor tradisional. Melalui pola ini diupayakan penggabungan aspek-aspek keunggulan perkebunan besar dengan aspek-aspek kelebihan perkebunan rakyat, yaitu, keuletan, ketangguhan dan stabilitas yang tinggi.

Selama ini perkebunan kelapa sawit yang telah dibangun di Sumatera Utara sampai akhir 2003 meliputi areal sekitar 760.387 ha. Dengan asumsi bahwa keperluan tenaga kerja untuk kegiatan kerja di tingkat kebun (industri hulu) adalah 4 orang setiap 10 ha, maka jumlah tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 304.155 orang.

Sementara itu berkenaan dengan keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS), bahwa sampai dengan 2003 jumlahnya mencapai 85 unit dengan kapasitas olah total diperkirakan mencapai 3.400 ton TBS per jam. Jika setiap PKS dengan kapasitas olah 30 ton TBS per jam diperlukan tenaga kerja sebanyak 136 orang (untuk dua *shift*), maka untuk seluruh PKS di Sumatera Utara telah menyerap tenaga kerja sekitar 15.400 orang. Tenaga kerja dalam jumlah banyak lagi akan dapat diserap oleh industri hilir yang berbahan baku kelapa sawit (6).

Maka dari itu industri kelapa sawit (mulai hulu sampai hilir) dapat menyerap sangat banyak tenaga kerja, berarti sektor ini merupakan salah satu wahana untuk memecahkan masalah sosial. Dengan demikian melalui subsektor ini juga telah tercapai sasaran pemerataan yaitu untuk memperoleh kesempatan kerja.

Berkenaan dengan misi pengusaha perkebunan sebagai salah satu pelaku ekonomi, telah ditetapkan memiliki dua misi sekaligus, yaitu misi ekonomi untuk memperoleh laba perusahaan (*profit oriented*), dan misi sosial untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat (*social oriented*).

Pengembangan Wilayah

Pembangunan perkebunan utamanya ditujukan untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri (melalui kegiatan peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu tanaman, penganeka-ragaman jenis, pemanfaatan lahan transmigrasi, lahan kering dan gambut), memanfaatkan sumberdaya alam dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam sistem agrobisnis yang terpadu dengan agro-industri melalui kerja sama yang saling menguntungkan antara produsen bahan baku dengan industri, didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit idealnya direncanakan pelaksanaannya di kawasan baru, yang

relatif masih belum diusahakan oleh manusia secara teratur. Dengan kata lain, kawasan tersebut masih merupakan kawasan yang belum berkembang dan jauh dari pusat keramaian. Dengan demikian harapan selanjutnya adalah usaha perkebunan tersebut akan dapat mengembangkan ekonomi wilayah dengan cara menimbulkan usaha-usaha baru yang terkait dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat perkebunan. Pengembangan ekonomi wilayah juga diharapkan dapat tercapai karena perkebunan kelapa sawit banyak yang dikembangkan di wilayah marginal yang selama ini kurang produktif (8).

Oleh karena itu, pengembangan perkebunan kelapa sawit di suatu kawasan biasanya terdiri dari dua komponen pembangunan fisik, yakni pengembangan kebun itu sendiri dan pembangunan komponen prasarana dan sarana seperti: jalan, jembatan, gedung sekolah, tempat ibadah dan sarana lainnya. Untuk selanjutnya akan diikuti dengan pembangunan-pembangunan sarana lainnya oleh masyarakat sekitar proyek, dalam rangka untuk memenuhi hajat hidup masyarakat perkebunan dan masyarakat pada umumnya. Dalam kawasan ini biasanya muncul perkotaan baru pusat kegiatan ekonomi dan sosial, yang lengkap dengan fasilitas perbelanjaan (toko, warung dan lain-lain), pusat perdagangan (pasar), pusat kesehatan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, olah raga, hiburan dan lain-lain. Kondisi demikian akan dapat menciptakan rasa kerasan pada diri para pekerja

perkebunan baik yang berasal dari penduduk lokal maupun pendatang. (4)

Studi terhadap beberapa kasus, memperlihatkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) mampu memperbaiki kesejahteraan ekonomi petani peserta. Pola ini telah berhasil mengembangkan perkebunan di luar Sumatera. Mengingat sifat dari usaha perkebunan yang banyak menyerap tenaga kerja, dan karena usaha perkebunan itu dikembangkan melalui perkebunan rakyat, maka keberhasilan perkebunan itu akan mengangkat kehidupan ekonomi para petani (8).

Pengalaman lain pada beberapa kasus, juga memperlihatkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit di suatu wilayah tidak akan menimbulkan gejolak sosial yang berarti bilamana peserta proyek sebagian berasal dari penduduk lokal. Hal ini dikarenakan penduduk lokal secara turun temurun telah mengusahakan tanah yang dijadikan sebagai areal pengembangan perkebunan kelapa sawit. Komposisi antara pendatang dan penduduk lokal yang ideal adalah masing-masing 50%. Bila di lokasi pengembangan memang kurang penduduknya maka komposisi tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Berkaitan dengan komposisi ini, maka pembagian kavling juga harus disiasati sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembauran antara pendatang dengan penduduk lokal. (7)

KESIMPULAN

Kontribusi hasil usaha perkebunan dan industri kelapa sawit terhadap perekonomian regional Sumatera Utara sangat signifikan. Hal ini terlihat dari proporsi sumbangannya yang cukup besar terhadap PDRB, selain itu juga sebagai sumber pendapatan potensial kepada pemerintah melalui pemungutan pajak. Kemudian keberadaan perusahaan perkebunan juga berperan dalam penyediaan lapangan kerja, dan juga dapat membawa misi sosial sebagai wahana pembangunan wilayah (*agent of development*) untuk mencapai sasaran pemerataan.

Paket teknologi telah banyak dikembangkan, baik di tingkat hulu maupun hilir. Berbagai teknologi telah dapat diaplikasikan (*adopted*) oleh pelaku usaha terutama tingkat hulu, misalnya penggunaan sarana produksi yang berkualitas tinggi, pelaksanaan kultur teknis benar dan tepat. Adopsi teknologi industri hilir masih sangat terbatas, mengingat pemilik modal masih bersikap hati-hati terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

1. ———. 1994. REPELITA VI BUKU III. Keppres No 17 th 1994. Republik Indonesia. Jakarta.
2. ———. 1995. Pidato Kenegaraan Presiden RI Soeharto di Depan Sidang DPR 16 Agustus 1995. Departemen Penerangan RI. Jakarta. 30 p.
3. Anonim. 1993. Ketetapan-ketetapan MPR-RI 1993 termasuk GBHN 1993-1998. Bumi Aksara. Jakarta.
4. Boeke, JH. 1983. The Interest of the Voiceless Far East (Prakapitalisme di Asia, alih bahasa D. Projosiswoyo). Sinar Harapan. Jakarta.
5. BPS. 2004. Statistik Kelapa Sawit 1998-2003. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
6. Ditjenbun. 2003. Statistik Perkebunan Indonesia 2001-2003: Kelapa Sawit. Departemen Pertanian. Jakarta.
7. Kartodirjo, S dan Djoko Surjo. 1991. Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi. Aditya Media. Yogyakarta.
8. Nasution, K. 2003. Kelayakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Dampak Sosial Ekonominya pada Masyarakat di Kabupaten Kampar Riau. MM Tesis. IPB. Bogor.
9. Soetrisno, L. 1989. "Masalah dan Prospek PIR-BUN". PRISMA. XVIII(4): 65-72. LP3ES. Jakarta
10. Susila, Wayan R. 2002. "Perkembangan dan Prospek Komoditas CPO". Tinjauan Komoditas Perkebunan: Kelapa Sawit, Karet, Gula, Kopi, Kakao dan The. Vol 2 No. 2.
11. Zen, Zahari, Colin Barlow and Ria Gondowarsito. 2005. Oil Palm in Indonesia's Socio-economic Improve-ment: A Review of Options. Department of Economics, RSPS, ANU. Canberra.

BENIH ASLI VS BENIH PALSU KELAPA SAWIT



PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT

Indonesian Oil Palm Research Institute (IOPRI)

Jl. Brigjend Katamso No. 51 Medan - 20158, Indonesia

Ph: +62-61-7862477 Fax: +62-61-7862488

E-mail: admin@iopri.org, Homepage: <http://www.iopri.org>

BENIH ASLI



DURA TERPILIH

- Buah Besar
- Sabut Tipis
- Cangang Tebal



PISIFERA TERPILIH

- Buah Abortus
- Sabut Tebal
- Cangang tidak ada



TENERA

- Buah Banyak
- Sabut Tebal
- Cangang Tipis
- Rendemen CPO 25 % - 28 %

BENIH PALSU

Benih Palsu Adalah :

1. Benih yang jenis persilangannya tidak sesuai dengan prosedur pengadaan benih.
2. Diproduksi oleh produsen liar tanpa mengikuti kaidah-kaidah pengadaan benih yang benar.
3. Diperoleh dari pohon tenera komersial atau brondolan dura liar.
4. Menghasilkan tanaman beragam dengan rendemen CPO 16 % - 18 %